

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan integratif terhadap bukti empiris yang disajikan dalam Bab IV dan keselarasan dengan kerangka teoritis yang diuraikan dalam Bab II, studi ini menyimpulkan bahwa pola komunikasi internal dalam koordinasi layanan gizi di SPPG Pejatan Barat 2 merupakan proses yang dibangun secara sosial, dinamis, interpretatif, dan terus berkembang. Dalam kerangka ini, komunikasi melampaui fungsi konvensional sebagai saluran untuk menyebarkan informasi atau arahan sebaliknya, komunikasi beroperasi sebagai arena diskursif di mana makna bersama diproduksi secara kolaboratif, sehingga memfasilitasi koordinasi adaptif dan lintas fungsi sebagai respons terhadap perubahan situasional. Temuan ini sesuai dengan perspektif Interaksionisme Simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead dan kemudian disistematisasikan oleh Herbert Blumer, yang menyatakan bahwa realitas sosial muncul dari interaksi interpretatif di antara relawan-relawan aktif. Dalam konteks operasional SPPG, aktor-aktor organisasi termasuk personel Kepala Sppg, ahli gizi, Tim Masak, Tim Packer, dan Driver membangun dan menegosiasikan pemahaman mereka tentang peran, wewenang, dan tanggung jawab profesional melalui pertukaran simbolik. Pertukaran semacam itu terwujud dalam praktik komunikasi rutin, termasuk wacana terkait pekerjaan sehari-hari, pengarahan terstruktur, pertemuan koordinasi berkala, dan penggunaan platform komunikasi digital seperti WhatsApp.

Koordinasi layanan gizi yang diamati dalam penelitian ini tidak mencerminkan model yang sepenuhnya dapat diprediksi secara struktural. Sebaliknya, koordinasi tersebut dibentuk melalui negosiasi makna yang berkelanjutan, terutama ketika dihadapkan pada situasi operasional, seperti keterlambatan pasokan bahan baku, Ketidaksesuaian dalam porsi, atau variasi jumlah penerima manfaat. Dalam mengatasi tantangan ini, anggota organisasi menunjukkan Kemampuan individu, konsisten dengan konsep diri Mead, yang mencakup kapasitas individu untuk menengahi antara dimensi impulsif (saya) dan dimensi yang diatur secara sosial (diri saya) dalam memandu penilaian dan tindakan. Selain itu, identitas peran dalam organisasi bukanlah atribut statis tetapi terus dibentuk dan ditegaskan kembali melalui interaksi simbolik yang berkelanjutan. Nilai-nilai institusional inti seperti disiplin, akuntabilitas, dan profesionalisme secara kolektif diinterpretasikan dan dioperasionalkan dalam praktik kerja sehari-hari. Oleh karena itu, efektivitas

koordinasi pelayanan gizi di SPPG Pejaten Barat 2 lebih dipengaruhi oleh kualitas hubungan hubungan sosial dan interpretasi simbolik bersama di antara para anggota dari pada sekadar keberadaan prosedur operasional standar formal atau pengaturan struktur.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan empiris studi ini dan dengan mengacu pada asumsi inti Teori Interaksi Simbolik, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ruang Interaksi Reflektif

SPPG Pejaten Barat 2 didorong untuk mempertahankan dan memperluas ruang komunikasi reflektif, termasuk forum diskusi yang terorganisir secara formal dan pertukaran lintas divisi informal. Ruang tersebut berfungsi sebagai ruang penting untuk konstruksi bersama makna bersama, evaluasi kolaboratif, dan proses pembelajaran kolektif yang tidak terikat oleh struktur komunikasi birokrasi yang kaku. Melalui keterlibatan dialogis yang terbuka, para aktor lebih mampu menegosiasikan makna dengan cara yang lebih dinamis dan konstruktif.

2. Standardisasi Simbol dan Bahasa Operasional

Mengingat bahwa bahasa, terminologi teknis, dan media komunikasi beroperasi sebagai simbol penting dalam praktik organisasi, upaya sistematis harus dilakukan untuk menyelaraskan interpretasi istilah, arahan kerja, dan prosedur operasional di semua divisi. Standardisasi ini penting untuk mengurangi perbedaan interpretasi yang dapat menimbulkan miskomunikasi dan menghambat koordinasi. Selain itu, kerangka simbolik bersama dapat meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan tugas di berbagai konteks operasional.

3. Penguatan Koordinasi Lintas Fungsi

Koordinasi organisasi harus melampaui garis wewenang vertikal untuk mencakup interaksi horizontal dan diagonal yang berkelanjutan di antara unit-unit. Fasilitasi forum koordinasi lintas fungsi secara teratur dapat memperkuat pemahaman setiap divisi tentang sifat saling ketergantungan peran dan tanggung jawab dalam sistem penyampaian layanan gizi yang lebih luas. Praktik-praktik tersebut berkontribusi pada pengembangan orientasi kolektif terhadap kolaborasi dalam mengejar tujuan program bersama.

4. Meningkatkan Sensitivitas terhadap Dinamika Situasional

Para pemimpin dan koordinator divisi disarankan untuk terus mempromosikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan kondisi situasional yang ditemui di

lapangan. Rekomendasi ini konsisten dengan perspektif interaksionisme simbolik, yang menekankan bahwa tindakan sosial muncul dari proses interpretasi situasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan organisasi dan keputusan operasional harus tetap adaptif terhadap perubahan kontekstual agar tetap relevan dan efektif.

Secara keseluruhan, penguatan komunikasi internal yang berlandaskan prinsip-prinsip interaksionisme simbolik diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas koordinasi dalam penyampaian layanan gizi, tetapi juga mendukung keberlanjutan organisasi dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan bagi penerima manfaat yang dituju.

